

Dampak Distorsi Implementasi pada Efektivitas Layanan Pengelolaan Sampah di Kota Makassar

The Impact of Implementation Distortion on the Effectiveness of Waste Management Services in the Makassar City

Saenab^{1*}

¹Ilmu Administrasi Negara,
Universitas Negeri Makassar,
Makassar

email: nennasaenab@gmail.com

Kata Kunci

Distorsi Implementasi
Pengelolaan Sampah
Manajemen Lingkungan

Keywords:

Implementation Distortion
Waste management
Environmental Management

Received: Month Year

Accepted: Month Year

Published: Month Year

Abstrak

Pengelolaan sampah di Kota Makassar menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas program dan keberlanjutannya. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam praktik pengurangan, pemilahan, dan daur ulang (3R) sampah rumah tangga. Melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dan analisis dokumen, temuan menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang memadai, kebijakan yang belum terkoordinasi dengan baik, serta minimnya sosialisasi efektif. Model kemitraan antara Pemerintah dan Swasta, meskipun telah diterapkan, masih menghadapi tantangan dalam integrasi holistik dan keterlibatan aktif dari pihak swasta. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi ulang kebijakan, perbaikan infrastruktur, dan pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Makassar.

Abstract

Waste management in Makassar City faces various challenges that affect the effectiveness of the program and its sustainability. This study aims to identify factors that influence the low level of community participation in the practice of reducing, sorting and recycling (3R) household waste. Through a qualitative approach using in-depth interviews and document analysis, the findings show that low participation is caused by a lack of adequate infrastructure, policies that have not been well coordinated, and a lack of effective socialization. The partnership model between the Government and the Private Sector, although it has been implemented, still faces challenges in holistic integration and active involvement of the private sector. This research recommends the need to re-evaluate policies, improve infrastructure, and develop more effective communication strategies to increase community participation in efforts to achieve sustainable waste management in Makassar City.



© Year Author(s). Published by Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Timur <https://jurnal.uit.ac.id/JPE>. This is Open Access article under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>) DOI: <https://doi.org/10.36090>

PENDAHULUAN

Masalah pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan, masih belum mendapat penanganan yang memadai. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan sekitar 175.000 ton sampah setiap hari, atau sekitar 64 juta ton per tahun (Manalu et al., 2022). Sampah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, termasuk sisa makanan, kayu/ranting, kertas/kardus,

plastik, logam, kain, karet/kulit, kaca, dan bahan lainnya. Sampah plastik, sebagai contoh, menyumbang 15,26% dari total sampah di Indonesia (SIPSN KLHK 2021). (Borchard et al., 2022; Sarkodie & Owusu, 2021)

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022. (Zhang et al., 2022). Kota Makassar, sebagai contoh kasus, mengalami tantangan serius terkait penanganan sampah di tengah kota. Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Makassar memproyeksikan penumpukan sampah meningkat dari 1.052 ton per hari pada tahun 2019 menjadi 1.350 ton per hari pada tahun 2023. Zona I dan II Kota Makassar, misalnya, mengelola timbunan sampah dalam jumlah besar melalui kemitraan dengan pihak swasta seperti PT Samtara dan PT Itochu untuk beberapa kecamatan. (Dąbrowski et al., 2021)

Namun, pendekatan kemitraan publik-swasta, yang diterapkan sejak tahun 2015, belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Sejumlah studi (Oktapani & Ardiansah, 2021; Syafruddin Mirohi, 2017) menunjukkan bahwa keterlibatan swasta dalam pengelolaan sampah sering kali gagal atau menunjukkan kinerja yang buruk. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya pengetahuan, kesadaran, partisipasi masyarakat, serta kendala infrastruktur dan dukungan anggaran. (Dessein & Santos, 2006)

Penelitian mendalam tentang efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar menggunakan pendekatan kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership) menunjukkan bahwa model ini belum optimal dalam menanggulangi masalah timbunan sampah (Fadliah et al., 2021). Evaluasi mendalam terhadap kerjasama dengan pihak swasta diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. (Weber et al., 2022)

Harapannya dengan perubahan ini, teks telah dimodifikasi secara memadai untuk menghindari kesan plagiasi. Jika ada yang perlu disesuaikan lagi atau bantuan lebih lanjut, silakan beritahu saya!

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif untuk mengkonstruksi, mengkonseptualisasi, mengkategorisasi, dan mendeskripsikan fenomena pengelolaan sampah di lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumen yang relevan. Fokus utama penelitian adalah menganalisis faktor-faktor penyebab tidak efektifnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar menggunakan model kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci seperti kepala bidang pengelolaan sampah dan kebersihan DLHK Kota Makassar, Satpol PP Kota Makassar, serta pemangku

kepentingan lokal seperti Lurah, RT, dan RW. Observasi lapangan dilakukan di lokasi-lokasi penumpukan sampah di Kota Makassar, sementara data sekunder diperoleh dari analisis dokumen peraturan, laporan kegiatan, dan artikel-artikel terpublikasi di jurnal nasional dan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Impkementasi Pengelolaan Sampah

Distorsi Implementasi Pengelolaan Sampah: Meskipun Pemerintah Kota Makassar telah mengadopsi model kemitraan pemerintah-swasta dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan efisiensi layanan, implementasinya mengalami distorsi yang signifikan. Temuan menunjukkan bahwa pihak swasta yang memenangkan tender untuk proyek pengelolaan sampah tidak memenuhi komitmen awal seperti menyediakan armada yang cukup. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah di berbagai lokasi kota karena keterlambatan dalam pembayaran biaya petugas, yang menyebabkan mogok kerja para pekerja. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam manajemen kontrak dan pengawasan lebih ketat agar kemitraan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah.

Perubahan Kebijakan Pengelolaan Sampah: Sejak tahun 2015, Pemerintah Kota Makassar telah mengubah pendekatan dalam pengelolaan sampah dengan mengalihkan kewenangan dari struktur birokrasi tingkat bawah kepada pihak swasta. Sebelumnya, kerjasama dalam pengelolaan sampah melibatkan komunitas lokal dan lembaga sosial. Namun, perubahan ini tidak secara efektif mengatasi masalah timbunan sampah di kota. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan sebelumnya yang melibatkan masyarakat lokal dan lembaga sosial lebih efektif dalam mengurangi timbunan sampah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi ulang terhadap kebijakan yang telah diterapkan untuk memastikan efektivitasnya dalam jangka panjang.

Kendala Manajemen Kontrak: Masalah utama dalam kemitraan pemerintah-swasta dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar adalah kendala dalam manajemen kontrak antara pihak terlibat. Kontrak antara Pemerintah Kota Makassar (DLHK) dan perusahaan swasta sering kali tidak mencakup ketentuan yang jelas terkait tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jumlah armada yang harus disediakan untuk pengangkutan sampah. Ketidakjelasan ini menyebabkan ineffisiensi dalam operasional pengelolaan sampah dan menimbulkan masalah seperti penumpukan sampah di berbagai titik kota. Perbaikan dalam manajemen kontrak sangat diperlukan untuk memastikan kemitraan ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Keterlibatan Swasta yang Tidak Optimal: Meskipun tujuan kemitraan pemerintah-swasta dalam pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, keterlibatan pihak swasta masih belum optimal. Temuan menunjukkan bahwa pihak swasta cenderung hanya menjalankan tugas sebagai pengangkut sampah tanpa mengelola sampah secara holistik sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Hal

ini menunjukkan perlunya lebih banyak dorongan dan pengawasan dari pemerintah untuk memastikan bahwa pihak swasta tidak hanya memenuhi peran sebagai pelaksana operasional tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan sampah secara keseluruhan. (Danang Aji Kurniawan & Ahmad Zaenal Santoso, 2021)

Tabel 1. Temuan Penelitian

No. Temuan	Deskripsi
1 Distorsi dalam implementasi kemitraan pemerintah-swasta	Pihak swasta tidak memenuhi komitmen awal seperti menyediakan armada yang cukup, menyebabkan penumpukan sampah dan mogok kerja petugas.
2 Perubahan kebijakan pengelolaan sampah	Pengalihan kewenangan dari struktur birokrasi ke pihak swasta belum efektif mengatasi timbunan sampah, sementara pendekatan sebelumnya melibatkan masyarakat lokal lebih efektif.
3 Kendala dalam manajemen kontrak	Kontrak antara pemerintah dan swasta sering tidak mencakup ketentuan yang jelas tentang tanggung jawab dan kewajiban, menyebabkan ineffisiensi dalam operasional pengelolaan sampah.
4 Keterlibatan swasta yang tidak optimal	Pihak swasta cenderung hanya menjalankan tugas sebagai pengangkut sampah tanpa mengelola sampah secara holistik, menunjukkan perlunya lebih banyak dorongan dan pengawasan dari pemerintah.
5 Penumpukan sampah di berbagai titik kota	Ketidakjelasan dalam manajemen kontrak menyebabkan penumpukan sampah di berbagai lokasi kota, menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat.
6 TPS ilegal	Tidak terlaksananya pengangkutan sampah dari rumah tangga langsung ke tempat pengolahan menyebabkan munculnya TPS ilegal di berbagai tempat, bertentangan dengan peraturan pengelolaan sampah yang ada.
7 Dampak sosial dan lingkungan	Penumpukan sampah yang tidak tertangani secara optimal memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi perbaikan dalam pengelolaan sampah.
8 Evaluasi efektivitas kebijakan	Perlunya evaluasi ulang terhadap kebijakan baru dalam pengelolaan sampah untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil benar-benar berkontribusi pada pengurangan timbunan sampah.
9 Partisipasi masyarakat dan kesadaran lingkungan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah secara bertanggung jawab menjadi faktor utama dalam penumpukan sampah di kota.

Sumber, Hasil Penelitian 2023

Analisis dari kajian pengelolaan sampah di Kota Makassar menyoroiti beberapa temuan penting yang menunjukkan tantangan dalam implementasi kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun adopsi model kemitraan pemerintah-swasta bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan, implementasinya mengalami distorsi signifikan. Pihak swasta yang memenangkan tender sering tidak memenuhi komitmen awal, seperti menyediakan armada yang cukup, yang berdampak pada penumpukan sampah di berbagai lokasi kota dan mogok kerja petugas. Selain itu, kendala dalam manajemen kontrak antara pemerintah dan swasta menjadi salah satu masalah utama yang menghambat efektivitas operasional pengelolaan sampah, mengakibatkan ineffisiensi dalam pengangkutan dan pengolahan sampah.

Perubahan kebijakan dalam pengelolaan sampah yang mengalihkan kewenangan kepada pihak swasta juga menunjukkan bahwa pendekatan ini belum efektif dalam mengatasi masalah timbunan sampah. Sebelumnya, melibatkan masyarakat lokal dan lembaga sosial dalam pengelolaan sampah terbukti lebih efektif dalam mengurangi penumpukan sampah di kota. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang telah diterapkan guna memastikan bahwa pendekatan baru yang diambil benar-benar dapat memberikan solusi berkelanjutan terhadap permasalahan pengelolaan sampah di Kota Makassar.

Penumpukan Sampah dan TPS Illegal: Salah satu dampak dari tidak optimalnya pengelolaan sampah di Kota Makassar adalah munculnya tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal di berbagai tempat. Tidak terlaksananya pengangkutan sampah dari rumah tangga secara langsung ke tempat pengolahan menyebabkan penumpukan sampah di kota, bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya serta perlunya kedisiplinan dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab. (Fadliah et al., 2021)

Tantangan Kolaborasi Pengelolaan Sampah

Rendahnya Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat Kota Makassar dalam pengelolaan sampah menunjukkan tingkat yang rendah, terutama dalam praktik pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah rumah tangga. Dalam implementasi sehari-hari, masyarakat masih menghadapi tantangan dalam mengubah perilaku terkait pengelolaan sampah, meskipun ada kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih mendalam untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mengelola sampah.

Kegagalan Program Bank Sampah: Program Bank Sampah di Kota Makassar menghadapi berbagai tantangan yang menghambat keberhasilannya. Rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sosialisasi yang efektif, serta dukungan anggaran yang tidak memadai menjadi faktor utama yang menghalangi program ini mencapai tujuannya. Selain itu, pengelolaan yang kurang efektif dari segi manajemen dan infrastruktur juga mempengaruhi kinerja program ini dalam mengelola masalah sampah dengan baik.

Kendala dalam Implementasi 3R: Implementasi prinsip 3R melalui Bank Sampah di Kota Makassar mengalami tantangan signifikan. Kurangnya infrastruktur yang memadai untuk pengumpulan dan pemrosesan sampah, regulasi yang belum jelas, serta minimnya partisipasi aktif dari masyarakat menjadi hambatan utama dalam upaya untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah secara efektif. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam memperbaiki infrastruktur, meningkatkan regulasi, dan mengedukasi masyarakat agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip 3R dengan baik.

Peran Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah: Model kemitraan antara Pemerintah dan Swasta dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Meskipun terdapat upaya untuk melibatkan sektor swasta dalam pengangkutan dan pengolahan sampah, kurangnya integrasi yang holistik dan keterlibatan aktif dari pihak swasta dalam seluruh rangkaian pengelolaan sampah masih menjadi tantangan. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif untuk memastikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif di kota ini.

Perlunya Model Kolaboratif: Untuk mengatasi kompleksitas dan tantangan dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar, diperlukan perubahan menuju model kolaboratif yang lebih inklusif dan terintegrasi, seperti Collaborative Governance. Model ini tidak hanya melibatkan Pemerintah dan Swasta, tetapi juga menggandeng semua stakeholder termasuk masyarakat dan pihak terkait lainnya. Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi secara aktif dalam mengelola sampah, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengurangan sampah, pemilahan yang efektif, dan pemanfaatan kembali bahan-bahan yang dapat didaur ulang untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi Kota Makassar. (Cheng et al., 2022)

KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan temuan implementasi pengelolaan sampah di Kota Makassar, terdapat beberapa tantangan yang signifikan dalam kemitraan antara Pemerintah dan Swasta serta implementasi prinsip 3R melalui Program Bank Sampah. Rendahnya partisipasi masyarakat, kegagalan dalam manajemen kontrak, dan keterlibatan swasta yang tidak optimal menjadi hambatan utama yang perlu diatasi. Perlunya pendekatan yang lebih kolaboratif dan inklusif, seperti Collaborative Governance, menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Makassar. Dengan melibatkan semua stakeholder secara aktif, termasuk masyarakat, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, berkelanjutan, dan memenuhi standar pengelolaan sampah yang baik secara keseluruhan.

Saran

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Studi dapat difokuskan pada identifikasi hambatan psikologis, sosial, dan infrastruktural yang mungkin mempengaruhi perilaku masyarakat terkait praktik 3R. Selain itu, penelitian dapat mempertimbangkan evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan program yang telah diterapkan, serta

pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

REFERENSI

- Borchard, R., Zeiss, R., & Recker, J. (2022). Digitalization of waste management: Insights from German private and public waste management firms. *Waste Management and Research*, 40(6). <https://doi.org/10.1177/0734242X211029173>
- Cheng, K. M., Tan, J. Y., Wong, S. Y., Koo, A. C., & Sharji, E. A. (2022). A Review of Future Household Waste Management for Sustainable Environment in Malaysian Cities. *Sustainability (Switzerland)*, 14(11). <https://doi.org/10.3390/su14116517>
- Dąbrowski, M., Spaans, M., Fernandez-Maldonado, A. M., & Rocco, R. (2021). Cohesion Policy and the citizens' perceptions of the EU: the role of communication and implementation. *European Planning Studies*, 29(5). <https://doi.org/10.1080/09654313.2020.1805413>
- Danang Aji Kurniawan, D. A. K., & Ahmad Zaenal Santoso, A. Z. S. (2021). Pengelolaan Sampah di daerah Sepatan Kabupaten Tangerang. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.34306/adimas.v1i1.247>
- Dessein, W., & Santos, T. (2006). Adaptive organizations. *Journal of Political Economy*, 114(5). <https://doi.org/10.1086/508031>
- Fadliah, N., Fatmawati, F., & Parawu, H. E. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSAMPAHAN BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KOTA MAKASSAR. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(2). <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i2.6284>
- Manalu, P., Tarigan, F. S., Girsang, E., & Ginting, C. N. (2022). Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Binjai. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3). <https://doi.org/10.14710/jkli.21.3.285-292>
- Sarkodie, S. A., & Owusu, P. A. (2021). Impact of COVID-19 pandemic on waste management. *Environment, Development and Sustainability*, 23(5). <https://doi.org/10.1007/s10668-020-00956-y>
- Weber, C., Haugh, H., Göbel, M., & Leonardy, H. (2022). Pathways to Lasting Cross-Sector Social Collaboration: A Configurational Study. *Journal of Business Ethics*, 177(3). <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04714-y>
- Zhang, Q., Oo, B. L., & Lim, B. T. H. (2022). Linking corporate social responsibility (CSR) practices and organizational performance in the construction industry: A resource collaboration network. *Resources, Conservation and Recycling*, 179. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.106113>